

**EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN DI
SURABAYA SELATAN BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN
MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN *FUZZY MULTI CRITERIA
DECISION MAKING (FUZZY MCDM)***

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh
DINIYA KHANSA NIDA
H72216050

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DINIYA KHANSA NIDA

NIM : H72216050

Program Studi : Matematika

Angkatan : 2016

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul "EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN DI SURABAYA SELATAN BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN *FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING (FUZZY MCDM)*". Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 17 Juni 2020

Yang menyatakan,



DINIYA KHANSA NIDA
NIM. H72216050

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh

Nama : DINIYA KHANSA NIDA

NIM : H72216050

Judul Skripsi : EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA
KECAMATAN DI SURABAYA SELATAN
BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT
DENGAN MENGGUNAKAN *FUZZY MULTICRITERIA
DECISION MAKING (FUZZY MCDM)*

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 Juni 2020

Pembimbing



Yuniar Farida, M.T

NIP. 197905272014032002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

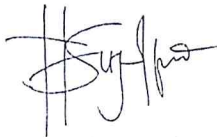
Skripsi oleh

Nama : DINIYA KHANSA NIDA
NIM : H72216050
Judul Skripsi : EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA
KECAMATAN DI SURABAYA SELATAN
BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT
DENGAN MENGGUNAKAN *FUZZY MULTICRITERIA
DECISION MAKING (FUZZY MCDM)*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 30 Juni 2020

Mengesahkan,
Tim Penguji

Penguji I



Yuniar Farida, M.T
NIP. 197905272014032002

Penguji II



Dian Candra Rini Novitasari, M.Kom.
NIP. 198511242014032001

Penguji III



Putroue Keumala Intan, M.Si.
NIP. 198805282018012001

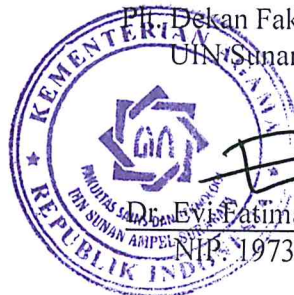
Penguji IV



Wika Dianita Utami, M.Sc.
NIP. 199206102018012003

Mengetahui,

PI. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag
NIP. 197312272005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINIYA KHANSA NIDA
NIM : H72216050
Fakultas/Jurusan : SAINS DAN TEKNOLOGI / MATEMATIKA
E-mail address : diniyakhansanida@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN DI SURABAYA

SELATAN BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN MENG-

GUNAKAN *FUZZY MULTICRITERIA DECISION MAKING*. (FUZZY MCDM).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2020

Penulis

(Diniya Khansa Nida)

2.4. <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	18
2.5. <i>Logika Fuzzy</i>	26
2.6. <i>Triangular Fuzzy Number (TFN)</i>	27
2.7. <i>Variabel Linguistik</i>	28
2.8. <i>Rata-Rata Nilai Fuzzy (Agregasi)</i>	30
2.9. <i>Defuzzifikasi</i>	31
2.10. <i>Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)</i>	31
III METODE PENELITIAN	35
3.1. <i>Jenis Penelitian</i>	35
3.2. <i>Jenis dan Sumber Data</i>	36
3.3. <i>Tahap Pengumpulan Data</i>	36
3.4. <i>Variabel Penelitian</i>	40
3.5. <i>Penyusunan Struktur Hierarki</i>	43
3.6. <i>Tahapan Penyelesaian Penelitian</i>	45
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1. <i>Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data</i>	51
4.2. <i>Penentuan Preferensi Kriteria dan Sub-Kriteria dengan AHP</i>	56
4.2.1. <i>Membentuk Matriks Perbandingan Berpasangan</i>	56
4.2.2. <i>Menghitung Preferensi atau Bobot Setiap Kriteria</i>	60
4.2.3. <i>Mengecek Konsistensi Matriks Prioritas</i>	62
4.3. <i>Perhitungan Nilai Kinerja Kualitas Pelayanan Kecamatan</i>	70
4.3.1. <i>Mengubah Data Awal Kedalam TFN</i>	70
4.3.2. <i>Menghitung Rata-Rata Nilai Fuzzy (Agregasi)</i>	72
4.3.3. <i>Melakukan Defuzzifikasi</i>	74
4.4. <i>Perankingan Kecamatan dengan TOPSIS</i>	79
4.4.1. <i>Membuat Matriks Keputusan Ternormalisasi</i>	79
4.4.2. <i>Membuat Matriks Ternormalisasi Terbobot</i>	82
4.4.3. <i>Menentukan Solusi Ideal Positif dan Negatif</i>	84
4.4.4. <i>Menentukan Jarak Solusi dengan Solusi Ideal</i>	88

4.4.5. Menghitung Preferensi Alternatif	90
4.4.6. Analisis Hasil Penelitian	92
V PENUTUP	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
A Lembar Validasi Kuesioner	104
B Kuesioner Tingkat Kepuasan Masyarakat	108
C Kuesioner Tingkat Kepentingan Kriteria	112
D Validasi Kuesioner 1	120
E Validasi Kuesioner 2	124
F Kuesioner Tingkat Kepentingan Kriteria Kecamatan Sawahan	128
G Kuesioner Tingkat Kepuasan Masyarakat Terisi	136
H Hasil Transformasi TFN Kecamatan Wonokromo	138
I Hasil Transformasi TFN Kecamatan Wonocolo	142
J Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Bukti Langsung	146
K Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keandalan	150
L Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Daya Tanggap	152
M Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Jaminan	153
N Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Empati	155

Indonesia adalah negara yang menerapkan otonomi daerah, yaitu pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada suatu daerah untuk mengurus sendiri kepentingan dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Hamid, 2011). Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur sebaik mungkin pelayanan publik di daerahnya sehingga masyarakat lebih terjamin dan selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Akan tetapi dilansir dari situs Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik (OMBUDSMAN RI), pengaduan pelayanan publik di Jawa Timur pada tahun 2019 masih tinggi, dengan instansi yang paling sering dikeluhkan adalah pemerintahan daerah (98 laporan) dan lokasi terbanyak terdapat pengaduan adalah Kota Surabaya yaitu terdapat 90 laporan (OMBUDSMAN, 2020).

Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 2.806.306 jiwa dan memiliki wilayah seluas kurang lebih 350,54 km^2 (Surabaya.go.id, 2018). Kota Surabaya terbagi menjadi lima wilayah yaitu Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat. Terdapat 31 kecamatan yang terbagi ke dalam masing-masing wilayah. Terdapat 4 kecamatan pada Surabaya Pusat, 5 kecamatan pada Surabaya Utara, terdapat masing-masing 7 kecamatan pada Surabaya Barat dan Surabaya Timur, dan terdapat 8 kecamatan pada Surabaya Selatan (Leviyanto, 2017).

Sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, data kependudukan merupakan salah satu urusan yang paling krusial dalam masyarakat. Sedikit kekeliruan atau kesalahan dalam memproses data kependudukan akan

berakibat sangat fatal. Salah satu data kependudukan yang paling banyak diproses adalah pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dilansir dari situs LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, terdapat beberapa pengaduan terkait pengurusan KTP di Surabaya. Pengaduan tersebut diantaranya membahas tentang pengurusan e-KTP yang memakan jangka waktu lama, sulitnya mengurus e-KTP yang hilang, atau blanko e-KTP yang tidak tersedia di kecamatan (LAPOR!, 2019). Beberapa isu terkait kendala pengurusan data kependudukan di kecamatan Kota Surabaya menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan di kecamatan Kota Surabaya harus lebih ditingkatkan lagi setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, wilayah Surabaya bagian selatan merupakan wilayah bagian dari kota Surabaya yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua pada tahun 2019. Jumlah penduduk di Surabaya Selatan pada tahun 2019 adalah 787.879 jiwa. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Surabaya Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 833.303 jiwa (BPS Surabaya, 2020). Akan tetapi jika dibandingkan dengan data luas wilayah bagian Surabaya, wilayah Surabaya Timur memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Surabaya Selatan. Kepadatan penduduk di wilayah Surabaya Timur adalah 9.139 jiwa/km^2 , sedangkan wilayah Surabaya Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 12.299 jiwa/km^2 (BPS Surabaya, 2018). Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah tentunya akan mempengaruhi kesibukan pada pelayanan kecamatan, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Selain jumlah kecamatan terbanyak terdapat pada Surabaya Selatan, berdasarkan kepadatan penduduk dan

jumlah penduduk di wilayah tersebut penulis memilih Surabaya Selatan untuk diteliti dan dilakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan kecamatan.

Penilaian kualitas pelayanan memiliki beberapa indikator utama yang dijadikan sebagai acuan. Terdapat 5 indikator atau kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bukti langsung, keandalan, daya tanggap, empati, dan jaminan. Pada masing-masing indikator atau kriteria terdapat beberapa sub-indikator atau sub-kriteria yang lebih spesifik dan menggambarkan hal-hal yang akan ditinjau secara langsung. Pada penelitian ini terdapat 32 sub-kriteria yang terbagi kedalam 5 kriteria. Karena kriteria yang banyak dan bercabang, maka diperlukan suatu metode yang tepat untuk melakukan penilaian. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian dengan multi kriteria adalah MCDM atau *Multi Criteria Decission Making*. *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) adalah sebuah metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang mengacu pada proses *screening*, *prioritizing*, dan *ranking* (Wahyuningsih, 2014). MCDM merupakan metode yang cocok dalam menyelesaikan suatu permasalahan pemilihan atau pengambilan keputusan yang memiliki banyak kriteria. Metode dalam MCDM yang sudah seringkali digunakan dalam penelitian adalah AHP atau *Analytical Hierarchy Process* dan TOPSIS atau *Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution*. Metode AHP maupun TOPSIS keduanya sangat baik jika digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. AHP merupakan suatu teknik pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria (multikriteria) yang dilakukan dengan cara menentukan prioritas atau pembobotan dari masing-masing alternatif yang tersedia (Sjamsulhadi, 2011). Selain digunakan untuk metode pendukung pengambilan keputusan, AHP juga seringkali digunakan untuk mencari skala prioritas atau bobot karena algoritma dalam AHP yang mempertimbangkan

tingkat perbandingan berpasangan. Sedangkan TOPSIS merupakan suatu teknik pendukung dalam sistem pengambilan keputusan dimana metode ini tidak hanya menghasilkan suatu alternatif solusi yang mendekati solusi ideal positif, tetapi juga menghasilkan alternatif solusi yang menjauhi solusi ideal negatif (Santiary et al, 2018). Data awal yang digunakan dalam metode TOPSIS adalah matriks keputusan dan juga bobot atau skala kepentingan dari masing-masing sub kriteria dalam matriks keputusan. Akan tetapi dalam metode TOPSIS belum ada pengukuran yang tepat terhadap matriks keputusan dan bobot prioritas (Kannan et al, 2014). Oleh karena itu pada penelitian ini perhitungan bobot atau tingkat perbandingan preferensi antar kriteria dan sub-kriteria dilakukan dengan menggunakan metode AHP.

Akan tetapi pada penilaian kualitas pelayanan kecamatan yang didasarkan dari kepuasan pelanggan akan ditemui suatu penilaian yang bersifat kabur. Hal itu terdapat pada penilaian dari masing-masing responden terhadap kualitas kecamatan pada setiap indikator atau kriteria. Dalam hal ini AHP ataupun TOPSIS tidak dapat digunakan begitu saja, akan tetapi teori *fuzzy* digunakan untuk mengatasi sifat kekaburan yang ada. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menggunakan teori *fuzzy* dalam mendapatkan nilai kualitas dari masing-masing kecamatan yang kemudian akan dijadikan sebagai matriks keputusan dalam TOPSIS sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah perankingan kecamatan terbaik di Surabaya Selatan.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herman Akdag, dkk. yang berjudul *The Evaluation of Hospital Service Quality by Fuzzy MCDM*, dimana pada penelitian ini juga dilakukan penggabungan antara metode AHP, teori *fuzzy*,

dan TOPSIS untuk mengevaluasi dan merankingkan kualitas dari beberapa rumah sakit di Turki. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penentuan rumah sakit terbaik dengan berdasarkan pada persepsi pelanggan dan menggunakan metode *Fuzzy MCDM* menghasilkan hasil yang baik dan konsisten jika diuji dengan beberapa operator seperti Yagers min-max, OWA, dan metode kompensasi AND (Akdag, 2014). Penelitian selanjutnya adalah penelitian mengenai pengukuran kualitas pelayanan angkutan udara atau pesawat terbang yang dilakukan oleh Sheng-Hshiang Tsaur dengan menggunakan metode Fuzzy MCDM. Penelitian ini berjudul *The evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM*. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa perpaduan antara teori *Fuzzy* dan MCDM sangat baik dalam menentukan peringkat maskapai penerbangan dan dapat dijadikan acuan bagi pihak manajemen maskapai untuk memperbaiki aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan maskapai (Tsaur, Chan, & Yen, 2002).

Selain beberapa penelitian mengenai perankingan kualitas pelayanan dengan menggunakan *fuzzy MCDM*, telah banyak penelitian yang dilakukan untuk merankingkan suatu hal menggunakan AHP maupun TOPSIS. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Reflin Yadi, dkk. yang berjudul Implementasi Metode TOPSIS untuk Menentukan Karyawan Terbaik di PT.KFC Cabang Demang, yang pada kesimpulannya didapatkan bahwa TOPSIS dapat menjadi salah satu metode yang memudahkan admin perusahaan dalam menilai kinerja karyawan (Yadi, Sobri, & Kunang, 2015). Kemudian terdapat penelitian lainnya yang menggunakan metode AHP dalam menentukan pemilihan rumah sakit terbaik. Penelitian ini dilakukan oleh Nanda Dimas Prayoga dan berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah Sakit Terbaik di Asahan Menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Dari hasil penelitian

2.2. Kecamatan

2.2.1. Definisi Kecamatan

Kecamatan merupakan suatu instansi atau perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pemerintahan, memberikan pelayanan publik, juga mengembangkan pemberdayaan masyarakat maupun kelurahan (Peraturan Walikota, 2016). Kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Keudukan kecamatan berada di bawah walikota dan berada diatas kelurahan, hal ini berarti kecamatan menaungi beberapa kelurahan yang ada di bawahnya.

2.2.2. Tugas dan Fungsi Kecamatan

Tugas dan fungsi kecamatan di Surabaya telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2006. Tugas kecamatan di Surabaya diantaranya adalah melaksanakan urusan permertintahan umum, mengadakan kegiatan pemberdayan masyarakat, membina dan mengawasi urusan pemerintahan di kelurahan, dan menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan fungsi kecamatan sebagai organisasi pemerintahan adalah penyusun rencana program, pelaksana, dan pengawas atas rencana program dan tugas yang telah dibebankan kepada kecamatan (Peraturan Walikota, 2016).

2.2.3. Kecamatan di Surabaya

Surabaya dibagi menjadi 4 wilayah yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, dan Surabaya Barat. Dilansir dari situs Surabaya.go.id (Peraturan Walikota, 2016) terdapat 31 kecamatan yang terbagi kedalam masing-masing wilayah, pembagian kecamatan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Surabaya Pusat : Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan.
- b. Surabaya Timur: Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo.
- c. Surabaya Barat: Benowo, Pakal, Asemrowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri.
- d. Surabaya Utara: Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantian, Krembangan.
- e. Surabaya Selatan: Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan.

2.3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan suatu kinerja yang dapat diukur dan ditawarkan dari penyedia layanan kepada konsumen. Kinerja ini berupa suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan (Lubis & Andayani, 2017). Kualitas pelayanan dapat diukur dengan didasarkan pada persepsi dari konsumen atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan pelayanan yang secara nyata dirasakan oleh konsumen pada saat itu dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Apabila yang diterima sama dengan yang diharapkan, kualitas pelayanan dianggap sudah baik dan memuaskan. Namun apabila yang dirasakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan, artinya kualitas pelayanan masih harus diperbaiki (Hasnih et al, 2016). Kualitas pelayanan dapat ditinjau dari beberapa dimensi. Menurut (Rukayat, 2017) dimensi kualitas pelayanan dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. *Tangibles* atau bukti nyata. Dimensi ini merepresentasikan kualitas pelayanan dari segi kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana di tempat pelayanan maupun sekitar tempat pelayanan dianggap sebagai bukti nyata dari pelayanan yang diberikan karena bersifat fisik, dapat dilihat secara langsung dan digunakan oleh pengguna jasa. Bukti nyata tidak hanya berupa sarana dan prasarana namun bisa juga berupa kesesuaian dan kerapihan penampilan pegawai.
- b. *Realibility* (Keandalan), yaitu kemampuan pihak penyedia pelayanan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat, handal, dan memuaskan. Hal ini juga bersangkutan dengan jam pelayanan, dan ketersediaan pegawai selama jam pelayanan. Apakah jam pelayanan diawali dan diakhiri secara tepat dan apakah para pegawai tetap tersedia pada saat dibutuhkan.
- c. *Responsivity* (Daya Tanggap), merupakan dimensi yang menggambarkan kualitas pelayanan dari segi kecepatan dan ketepatan staff dalam melayani konsumen. Hal ini mencakup apakah para pegawai tanggap dan sigap dalam melayani juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Karena jika terjadi kelalaian atau membiarkan pelanggan menunggu akan menjadi penilaian buruk terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
- d. *Assurance* (Jaminan), yaitu dimensi kualitas pelayanan yang mencakup jaminan kemampuan pegawai, bebas dari keraguan, kesopanan, dan juga keamanan (keamanan privasi maupun keamanan tempat).
- e. *Emphaty* (Empati), merupakan dimensi kualitas pelayanan yang menggambarkan tentang kemudahan dalam berkomunikasi antara penyedia jasa dengan pelanggan, juga perhatian dan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan

keputusan yang dibuat didasarkan pada asumsi para ahli. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dalam metode AHP:

- a. Penggunaan skala rasio yang berdasarkan proses wawancara terhadap ahli dapat menimbulkan ambigu atau ketidakpastian.
- b. Ketergantungan metode ini terhadap subyektifitas seorang ahli yang nantinya akan menjadi inputan. Jika ada salah satu yang salah persepsi maka penilaian menjadi tidak berarti.
- c. Pada saat memetakan persepsi seorang ahli ke bentuk numerik yang akan dihitung, tidak ada perhitungan khusus untuk meminimalisir error.

Menurut Kursini (2007) langkah-langkah dalam menggunakan metode AHP adalah sebagai berikut (Teriyasmur, 2014):

- a. Menetapkan masalah dan solusi yang ingin dicapai
Tahapan pertama dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan AHP adalah mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. Setelah masalah teridentifikasi maka secara otomatis goals atau tujuan yang ingin dicapai sudah jelas. Ketika tujuan yang hendak dicapai sudah ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan beberapa alternatif solusi yang selanjutnya dapat diproses hingga mendapatkan solusi terbaik.
- b. Membuat pohon struktur hierarki
Pohon hierarki disusun untuk menyederhanakan permasalahan yang rumit dimana akan disusun dalam sebuah struktur sederhana berdasarkan kepentingan masalah didalamnya. Penyusunan struktur hierarki diawali dengan tujuan umum yang akan dicapai. Kemudian di level selanjutnya terdapat

Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Berpasangan

B	A_1	A_2	...	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
...
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

Nilai pada sel $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{mn}$ adalah nilai perbandingan kepentingan dari elemen baris terhadap elemen kolom yang menyatakan seberapa besar kepentingan dibandingkan dengan kolom. Nilai yang digunakan untuk mengisi perbandingan tersebut diperoleh dari ketentuan Saaty dengan skala perbandingan 1 sampai dengan 9, dimana nilai 1 mendefinisikan sama pentingnya dengan kriteria lain, 3 mendefinisikan sedikit lebih penting, 5 mendefinisikan kriteria tersebut lebih penting, 7 mendefinisikan sifat sangat lebih penting, dan 9 mendefinisikan mutlak lebih penting dan tidak ada yang melampauinya. Misal jika kriteria A_1 lebih penting dari kriteria A_2 , maka bobot kriteria A_1 terhadap kriteria A_2 adalah 5 (lima), sedangkan bobot kriteria A_2 terhadap kriteria A_1 adalah $1/5$ atau 0,2. Hal ini disebut elemen kebalikan karena merepresentasikan nilai kebalikan dari tingkat kepentingan lawannya. Jika kriteria A_1 lebih penting daripada A_2 , maka hal ini berlaku kebalikan pada kriteria A_2 . Sedangkan angka genap digunakan untuk kriteria yang kepentingannya adalah rata-rata. Nilai rata-rata atau genap digunakan pada saat ahli tidak bisa menentukan secara pasti diantara dua nilai saaty. Ketentuan saaty dalam perbandingan kepentingan setiap kriteria disajikan pada Tabel 2.2 :

b. Penentuan jumlah responden kepuasan masyarakat

Dalam metode *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) tidak ada metode khusus untuk menentukan jumlah sampel dalam penyebaran kuesioner. Berdasarkan referensi-referensi yang didapatkan oleh peneliti, penyebaran kuesioner pada penelitian sebelumnya menggunakan konsep *return rate* dan penyebaran kuesioner dilakukan lebih dari 4 bulan. *Return rate* adalah konsep penyebaran kuesioner dengan jumlah tertentu dan melihat tingkat pengembalian kuesioner, dan tidak ada patokan khusus dalam menentukan tingkat pengembalian. Akan tetapi karena waktu dan sumber daya yang terbatas dalam penyebaran kuesioner, pada penelitian ini peneliti melakukan diskusi dengan validator pada kecamatan dan mencari referensi terkait jumlah sampel pada metode fuzzy MCDM. Berdasarkan hasil diskusi dengan validator didapatkan jumlah sampel sebanyak 20 orang per kecamatan. Jumlah sampel ini dipilih karena dirasa sudah mewakili karena jumlah pemohon dalam sehari adalah 20-50 orang. Selain itu untuk meningkatkan kevalidan hasil kuesioner ditetapkan kriteria responden yang akan mengisi kuesioner, yaitu responden sudah mengurus berkas lebih dari 2x pada kecamatan yang sama, dengan ditetapkannya kriteria ini maka penilaian akan lebih objektif. Selain itu berdasarkan referensi penelitian terdahulu menurut (Dang et al, 2019) jumlah sampel yang tidak terlalu banyak dianjurkan pada metode fuzzy, karena jumlah sampel yang terlalu besar akan menimbulkan perhitungan yang lebih kompleks. Pada penelitiannya, (Dang et al, 2019) juga menyarankan jumlah sampel untuk

Tabel 3.2 Variabel Alternatif Penelitian

NO.	NAMA KECAMATAN	NO.	NAMA KECAMATAN
1.	Kecamatan Dukuh Pakis	5.	Kecamatan Sawahan
2.	Kecamatan Gayungan	6.	Kecamatan Wiyung
3.	Kecamatan Jambangan	7.	Kecamatan Wonocolo
4.	Kecamatan Karang Pilang	8.	Kecamatan Wonokromo

3.5. Penyusunan Struktur Hierarki

Struktur hierarki merupakan suatu struktur yang berbentuk pohon dan bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan multikriteria yang rumit sehingga terlihat lebih tersusun dan mudah dipahami. Struktur hierarki disusun berdasarkan tingkat kepentingan suatu hal pada permasalahan multikriteria. Dalam MCDM struktur hierarki tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan susunan permasalahan, namun juga dapat mempermudah dalam perhitungan preferensi.

Struktur hierarki pada dasarnya terdiri dari beberapa tingkat yang disusun secara berurutan. Tingkat teratas atau tingkatan pertama diisi dengan *goal* atau tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pengambilan keputusan. Tingkatan selanjutnya berisi kriteria yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan masalah, biasanya dalam suatu kriteria terdapat beberapa sub-kriteria. Oleh karena itu sub-kriteria berada pada tingkatan ketiga setelah kriteria. Tingkatan terakhir pada struktur hierarki adalah alternatif yang akan dinilai dan dihitung preferensinya berdasarkan kriteria dan sub-kriteria yang telah tersedia. Struktur hierarki penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. dengan penjabaran sub-kriteria dapat dilihat pada Tabel 3.1.

langkah berikutnya.

- f. Setelah rasio dianggap konsisten maka hasil dari proses AHP pada penelitian ini adalah preferensi atau bobot kepentingan dari masing-masing kriteria dan sub kriteria. Untuk mendapatkan preferensi akhir dari masing-masing sub kriteria adalah dengan mengalikan bobot sub kriteria dengan bobot pada kriteria. Selanjutnya preferensi atau bobot yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bobot pada perhitungan TOPSIS.
5. Membentuk matriks keputusan TOPSIS dengan operasi fuzzy. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung bobot kinerja kecamatan pada setiap sub kriteria berdasarkan survey kepuasan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Mengubah variabel linguistik yang telah didapatkan dari kuesioner kedalam bentuk bilangan segitiga fuzzy (TFN) berdasarkan Tabel 2.4
 - b. Melakukan agregasi atau penggabungan guna mendapatkan bilangan segitiga fuzzy akhir. Hal ini dilakukan karena survey dilakukan ke beberapa responden. Agregasi dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.11. Persamaan ini didapatkan dengan didasarkan pada operasi pada bilangan segitiga fuzzy pada Persamaan 2.7 dan Persamaan 2.9
 - c. Mengubah bilangan segitiga fuzzy akhir kedalam bentuk bilangan *crisp* atau bilangan tegas dengan cara defuzzifikasi. Defuzzifikasi dihitung dengan Persamaan 2.12. Hasil dari proses ini adalah bilangan yang melambangkan nilai bobot atau kinerja dari suatu kecamatan di sub-kriteria tertentu. Hal ini sekaligus dapat mengevaluasi aspek manakah dari kualitas pelayanan yang harus diperbaiki dari suatu kecamatan.

yang telah didapat pada tahap AHP sebelumnya atau dengan Persamaan 2.14

- d. Menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Hal ini dilakukan untuk selanjutnya dicari solusi yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan terjauh dengan solusi ideal negatif. Matriks ini dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.15 dan 2.16.
 - e. Menentukan jarak dengan solusi ideal. Setelah solusi ideal didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jarak masing-masing nilai y_{ij} dengan solusi ideal positif dan negatif dengan menggunakan Persamaan 2.17 dan 2.18.
 - f. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan menggunakan Persamaan 2.19. Nilai preferensi ini akan menghasilkan urutan peringkat seluruh alternatif yang tersedia dan hal tersebut adalah hasil atau output dari metode TOPSIS.
7. Pada penelitian ini akan menghasilkan tiga buah *output*. Hasil yang pertama adalah tingkat preferensi kriteria dan sub-kriteria pada penilaian kualitas pelayanan kecamatan. Hasil berikutnya adalah matriks keputusan yang menggambarkan kinerja masing-masing kecamatan di setiap sub-kriteria. Dari hasil ini dapat ditinjau sub-kriteria manakah yang harus dievaluasi. Hasil terakhir adalah perankingan kecamatan di Surabaya Selatan, mulai dari kecamatan dengan kinerja tertinggi sampai terendah.

Tahapan penyelesaian pada penelitian ini dapat dilihat pada *flowchart* yang ditunjukkan pada Gambar 3.4.

IV. PENILAIAN SECARA UMUM

URAIAN	A	B	C	D
Penilaian secara umum terhadap format angket/ kuesioner tentang survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan.				

$$\begin{aligned} \text{NILAI VALIDASI (NV)} &= \frac{\text{Total Nilai}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100 \\ &= \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100 = \dots\dots\dots \end{aligned}$$

Gambar 4.2 Cuplikan Lembar validasi Kuesioner

Dari proses diatas maka didapatkan hasil bahwa kuesioner dapat digunakan dengan revisi sedikit. Hal yang harus direvisi adalah penulisan yang dikhawatirkan bermakna ganda, dan pengurangan sub kriteria yang digunakan. Berdasarkan proses validasi didapatkan 2 sub-kriteria yang dieliminasi, yaitu ketanggapan camat dalam melayani masyarakat, dan kualitas camat. Sub-kriteria tersebut dieliminasi karena beberapa alasan yaitu camat tidak melayani masyarakat secara langsung, dan masyarakat secara umum tidak terlalu mengetahui terkait kualitas camat . Masyarakat yang mengurus berkas pada kecamatan akan berhubungan dengan bagian pelayanan, dan sedikit sekali bahkan tidak ada masyarakat yang berurusan langsung dengan pimpinan atau camat. Oleh karena itu kedua sub-kriteria ini dieliminasi, sehingga pada penelitian ini menggunakan 5 kriteria dan 32 sub-kriteria.

- B. Data Tingkat Kepentingan Kriteria Pengumpulan data perbandingan tingkat kepentingan antar kriteria dan sub kriteria dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pakar/ahli, dimana pakar pada penelitian ini adalah kepala bagian sie pemerintahan pada 6 (enam) kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah wonocolo, wonokromo, wiyung, karang pilang, sawahan, dan

4.2. Penentuan Preferensi Kriteria dan Sub-Kriteria dengan AHP

Data yang diperoleh dari kuesioner tingkat kepentingan antar kriteria kemudian diolah dengan menggunakan metode AHP. Data kuesioner diolah untuk mendapatkan tingkat preferensi antar kriteria. Preferensi ini selanjutnya akan digunakan pada tahap selanjutnya yaitu tahap perankingan kecamatan. Perhitungan preferensi tidak hanya dilakukan pada tahap kriteria, tetapi juga dilakukan pada tingkat sub-kriteria. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan preferensi akhir dari sub-kriteria.

Langkah yang dilakukan adalah menghitung preferensi pada tingkat kriteria, kemudian menghitung preferensi dari sub-kriteria dalam setiap kriteria. Langkah akhir dalam penentuan preferensi ini adalah mencari preferensi akhir dari sub-kriteria dengan cara mengalikan preferensi sub-kriteria dengan preferensi pada tingkat kriteria. Berikut ini adalah penjabaran perhitungan preferensi dimana yang digunakan sebagai contoh perhitungan adalah pada tingkat kriteria pelayanan:

4.2.1. Membentuk Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan disusun setelah membentuk struktur hierarki dari permasalahan. Matriks perbandingan berpasangan disusun untuk mengetahui apakah suatu kriteria lebih penting dari kriteria lainnya ataukah sebaliknya. Berdasarkan Tabel 2.1, yang mengisi sel A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , dan A_5 adalah kriteria pelayanan yaitu bukti langsung (*tangibles*), keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsivity*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Pada penelitian ini matriks perbandingan berpasangan yang dibentuk tidak hanya satu, tetapi ada 6 matriks perbandingan kriteria karena terdapat 6 responden yang mengisi kuesioner tingkat kepentingan kriteria. Matriks perbandingan berpasangan

Tabel 4.4 Matriks Perbandingan Berpasangan Responden 4 (Kecamatan Sawahan)

	<i>Tangible</i>	<i>Reliability</i>	<i>Responsivity</i>	<i>Assurance</i>	<i>Empathy</i>
<i>Tangible</i>	1	0,5	0,33333	0,33333	1
<i>Reliability</i>	2	1	0,5	0,5	0,5
<i>Responsivity</i>	3	2	1	2	2
<i>Assurance</i>	3	2	0,5	1	3
<i>Empathy</i>	1	2	0,5	0,33333	1

Tabel 4.5 Matriks Perbandingan Berpasangan Responden 5 (Kecamatan Gayungan)

	<i>Tangible</i>	<i>Reliability</i>	<i>Responsivity</i>	<i>Assurance</i>	<i>Empathy</i>
<i>Tangible</i>	1	0,2	0,33333	0,33333	1
<i>Reliability</i>	5	1	0,5	0,5	0,2
<i>Responsivity</i>	3	2	1	3	3
<i>Assurance</i>	3	2	0,33333	1	1
<i>Empathy</i>	1	5	0,33333	1	1

Tabel 4.6 Matriks Perbandingan Berpasangan Responden 6 (Kecamatan Wiyung)

	<i>Tangible</i>	<i>Reliability</i>	<i>Responsivity</i>	<i>Assurance</i>	<i>Empathy</i>
<i>Tangible</i>	1	1	1	5	2
<i>Reliability</i>	1	1	1	2	1
<i>Responsivity</i>	1	1	1	3	1
<i>Assurance</i>	0,2	0,5	0,33333	1	1
<i>Empathy</i>	0,5	1	1	1	1

Tabel 4.10 Matriks Akhir Perbandingan Berpasangan Sub-kriteria *Responsivity*

	C1	C2	C3	C4	C5
C1	1	0,83268	0,72302	1,03789	0,61771
C2	1,20094	1	1,20094	1,37473	1,61887
C3	1,38309	0,83268	1	1,76273	0,64805
C4	0,96349	0,72742	0,56730	1	0,50541
C5	1,61888	0,61771	1,54309	1,97861	1

Tabel 4.11 Matriks Akhir Perbandingan Berpasangan Sub-kriteria *Assurance*

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
D1	1	0,63293	0,45824	0,21126	0,21126	0,25047	0,32753
D2	1,57997	1	2,46621	0,41017	0,22573	0,34200	1,08887
D3	2,18225	0,40548	1	0,25218	0,20493	0,18884	0,35161
D4	4,73361	2,43802	3,96541	1	2,50990	2,90419	3,94159
D5	4,73361	4,43017	4,87966	0,39842	1	2,33482	2,54230
D6	3,99250	2,92402	5,29544	0,34433	0,42830	1	3,66664
D7	3,05316	0,91839	2,84410	0,25370	0,39334	0,27273	1

Tabel 4.12 Matriks Akhir Perbandingan Berpasangan Sub-kriteria *Empathy*

	E1	E2	E3	E4	E5
E1	1	0,74184	1,34801	0,55032	0,83268
E2	1,34801	1	3,36739	1,61887	1,44225
E3	0,74184	0,29697	1	0,30967	0,33132
E4	1,81713	0,61771	3,22927	1	1,12246
E5	1,20094	0,69336	3,01825	0,89090	1

pegawai atau staff melayani dengan cepat dan tanggap, maka masyarakat akan puas dan kualitas pelayanan akan bertambah baik. Kriteria yang memiliki kepentingan terbesar kedua setelah daya tanggap adalah kriteria jaminan dengan nilai preferensi sebesar 0,226048. Kemudian disusul oleh kriteria empati dan keandalan dengan nilai preferensi masing-masing sebesar 0,174847 dan 0,16784. Sedangkan kriteria yang memiliki tingkat kepentingan paling rendah dalam penilaian kualitas pelayanan adalah bukti langsung atau *tangible* dengan nilai preferensi sebesar 0,083769 atau jika diubah dalam bentuk persentase adalah sebesar 8,38 persen dari total seluruhnya. Hal ini bisa dikarenakan beberapa sebab atau alasan. Diantaranya adalah pihak pemerintah kecamatan lebih mengutamakan kualitas pegawai atau pelayanan yang diberikan dibandingkan dengan sarana prasarana penunjang. Selain itu pelayanan di kecamatan terbilang memakan waktu yang tidak lama untuk satu orang pemohon. Oleh karena itu pihak kecamatan lebih mengutamakan aspek lain seperti empati dan jaminan.

Berdasarkan Tabel 4.18 juga dapat dilihat bahwa sub kriteria yang memiliki tingkat kepentingan atau preferensi akhir paling besar adalah sub kriteria C1 dalam kriteria daya tanggap. Sub-kriteria ini memiliki nilai preferensi sebesar 0,086427 atau jika diubah dalam bentuk persentase adalah sebesar 8,64 persen. Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa sub-kriteria C1 adalah kecepatan dalam menanggapi complain atau pengaduan. Sedangkan sub-kriteria yang memiliki tingkat kepentingan atau preferensi akhir paling kecil adalah sub-kriteria A6 dalam kriteria bukti langsung atau *tangible*. Sub-kriteria ini memiliki nilai preferensi sebesar 0,003639 atau jika diubah dalam bentuk persentase adalah sebesar 0,37 persen. Jika dilihat dalam Tabel 3.1 sub kriteria A6 adalah tersedianya majalah atau televisi sebagai hiburan. Sub-kriteria ini dianggap tidak teralu penting dalam

pelayanan di kecamatan. Hal ini disebabkan oleh kesibukan di tempat pelayanan yang mengakibatkan tidak terlalu banyak orang yang menyempatkan untuk menonton televisi atau majalah. Selain itu waktu pelayanan yang terbilang cukup singkat membuat para ahli mengesampingkan aspek ini dan lebih mengutamakan performa dalam melayani masyarakat. Akan tetapi berdasarkan observasi peneliti menemukan bahwa aspek hiburan di kantor kecamatan seperti televisi atau majalah dianggap cukup penting oleh masyarakat karena sebagai selingan dikala menunggu berkas sedang diproses oleh pihak kecamatan.

4.3. Perhitungan Nilai Kinerja Kualitas Pelayanan Kecamatan

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat di masing-masing kecamatan kemudian diolah untuk mendapatkan nilai kinerja masing-masing kecamatan. Nilai kinerja ini kemudian akan digunakan sebagai matriks keputusan pada metode TOPSIS. Kuesioner kepuasan masyarakat menghasilkan data berupa tingkat kepuasan yang berbentuk variabel linguistik seperti puas dan tidak puas. Variabel linguistik tersebut kemudian diubah kedalam bentuk bilangan segitiga fuzzy atau *triangle fuzzy number* (TFN) dan selanjutnya akan dilakukan *averaging* dan defuzzyfikasi untuk mendapatkan matriks keputusan tiap kecamatan di setiap sub-kriteria. Berikut ini adalah contoh perhitungan pada kecamatan wonokromo:

4.3.1. Mengubah Data Awal Kedalam TFN

Kuesioner yang disebar di setiap kecamatan berjumlah 20. Setiap responden menilai kualitas pelayanan di kecamatan pada setiap sub kriteria. Diberikan 5 variabel linguistik untuk mempermudah responden menilai kualitas pelayanan, yaitu Sangat Tidak Puas (STP), Tidak Puas (TP), Cukup Puas (CP),

A4	0,6233	0,5317	0,4983	0,5500	0,5500	0,5600	0,6100	0,6000
A5	0,6350	0,5800	0,5083	0,5567	0,5867	0,6083	0,6400	0,6350
A6	0,6483	0,6533	0,3550	0,6850	0,6300	0,6000	0,6100	0,6283
A7	0,6767	0,6300	0,60833	0,6383	0,5400	0,6300	0,6167	0,6583
A8	0,6933	0,5100	0,62333	0,6450	0,6267	0,6500	0,6900	0,6283
A9	0,6933	0,6867	0,61000	0,6667	0,6467	0,6467	0,6633	0,6267
A10	0,6783	0,5567	0,59833	0,6400	0,5900	0,6267	0,7050	0,6567
B1	0,5200	0,6633	0,6450	0,5300	0,5400	0,5900	0,5900	0,5700
B2	0,6367	0,6667	0,6550	0,6533	0,6283	0,5800	0,6367	0,6733
B3	0,6350	0,6717	0,6283	0,6167	0,6367	0,6100	0,6350	0,6400
B4	0,6067	0,6467	0,6300	0,6217	0,6000	0,6183	0,5500	0,7283
B5	0,6667	0,6400	0,6383	0,6833	0,5500	0,6300	0,6667	0,6083
C1	0,6850	0,7083	0,5800	0,5983	0,7117	0,6850	0,6717	0,6367
C2	0,6383	0,6283	0,5383	0,6100	0,6850	0,5600	0,6183	0,5500
C3	0,6533	0,6817	0,5983	0,6467	0,5100	0,5800	0,6900	0,6367
C4	0,6683	0,5783	0,6050	0,6100	0,6200	0,6000	0,7500	0,6600
C5	0,6700	0,6383	0,6050	0,6750	0,5967	0,6500	0,7333	0,5600
D1	0,6667	0,6750	0,5883	0,7017	0,6283	0,6567	0,7067	0,6600
D2	0,6283	0,6067	0,5800	0,6567	0,6000	0,6300	0,6300	0,6300
D3	0,6367	0,6600	0,6400	0,7017	0,6567	0,6000	0,7000	0,6583
D4	0,7050	0,6733	0,6100	0,6250	0,6650	0,6400	0,6917	0,6450
D5	0,5883	0,5967	0,5800	0,5683	0,6567	0,6000	0,6267	0,5983
D6	0,6783	0,6917	0,6167	0,6367	0,6583	0,6100	0,6867	0,6600
D7	0,7167	0,6817	0,6017	0,6533	0,6850	0,6383	0,6633	0,6917
E1	0,6283	0,6533	0,5983	0,6183	0,5900	0,6000	0,5600	0,7117
E2	0,7033	0,6817	0,6650	0,7133	0,6600	0,6400	0,6633	0,6533
E3	0,6083	0,5283	0,5983	0,5500	0,5700	0,6100	0,5800	0,6100
E4	0,6750	0,6517	0,5683	0,6183	0,6200	0,6300	0,5700	0,6300
E5	0,7117	0,6983	0,6117	0,6467	0,6867	0,6500	0,5900	0,6000

Berdasarkan Tabel4.18 kita dapat meninjau sub-kriteria yang perlu dievaluasi atau diberi perhatian lebih dari masing-masing kecamatan. Selain itu dapat pula dilakukan peninjauan terhadap sub-kriteria yang unggul dari suatu kecamatan, hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

h. Kecamatan Jambangan (K8)

Pada kecamatan ini sub-kriteria yang harus dievaluasi dan diberi perhatian lebih adalah sub kriteria C2 dengan nilai sebesar 0,55. Sub-kriteria C2 adalah kecepatan dalam menanggapi complain atau pengaduan. Sub-kriteria yang memiliki nilai unggul pada kecamatan Jambangan adalah sub-kriteria B4 dengan nilai BNP sebesar 0,7283 dimana sub-kriteria B4 mewakili kesesuaian output yang dihasilkan.

4.4. Perankingan Kecamatan dengan TOPSIS

Data hasil perhitungan BNP masing-masing kecamatan pada Tabel 4.18 dan data preferensi akhir sub-kriteria pada Tabel 4.13 selanjutnya akan diolah dengan menggunakan TOPSIS untuk mendapatkan perankingan kecamatan di Surabaya Selatan. Data BNP digunakan sebagai matriks keputusan awal, sedangkan data preferensi akhir sub-kriteria digunakan sebagai bobot. Perhitungan perankingan kecamatan di Surabaya Selatan dilakukan dalam beberapa tahap yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

4.4.1. Membuat Matriks Keputusan Ternormalisasi

Ketika matriks keputusan dan preferensi atau vektor bobot sub-kriteria telah disiapkan maka langkah awal yang dilakukan dalam menghitung perankingan alternatif dengan menggunakan metode TOPSIS adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi. Pada penelitian ini matriks keputusan yang dipakai adalah data BNP per kecamatan pada Tabel 4.18. Perhitungan normalisasi matriks keputusan dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.13. Perhitungan r_{ij} atau data ternormalisasi dilakukan per sub-kriteria. Berikut ini adalah penjabaran perhitungan normalisasi pada sub-kriteria A1:

Tabel 4.19 Hasil Perhitungan Normalisasi Matriks Keputusan

	Kecamatan							
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
A1	0,39206	0,37042	0,30824	0,35060	0,30283	0,37493	0,37042	0,34879
A2	0,38411	0,36690	0,30892	0,36780	0,33700	0,36780	0,34244	0,34787
A3	0,37255	0,31110	0,34470	0,36871	0,36871	0,39271	0,33414	0,32838
A4	0,38881	0,33163	0,31084	0,34306	0,34306	0,34930	0,38049	0,37425
A5	0,37714	0,34447	0,30191	0,33061	0,34843	0,36130	0,38011	0,37714
A6	0,37644	0,37934	0,20612	0,39773	0,36580	0,34838	0,35418	0,36483
A7	0,38220	0,35584	0,34360	0,36055	0,30501	0,35584	0,34831	0,37184
A8	0,38569	0,28371	0,34675	0,35880	0,34861	0,36159	0,38384	0,34953
A9	0,37394	0,37034	0,32899	0,35956	0,34877	0,34877	0,35776	0,33798
A10	0,37881	0,31086	0,33413	0,35740	0,32948	0,34995	0,39370	0,36671
B1	0,31529	0,40220	0,39109	0,32136	0,32742	0,35774	0,35774	0,34561
B2	0,35071	0,36723	0,36081	0,35989	0,34612	0,31949	0,35071	0,37091
B3	0,35389	0,37432	0,35017	0,34367	0,35482	0,33995	0,35389	0,35667
B4	0,34210	0,36465	0,35525	0,35055	0,33834	0,34867	0,31014	0,41070
B5	0,37023	0,35543	0,35450	0,37949	0,30544	0,34987	0,37023	0,33784
C1	0,36628	0,37875	0,31013	0,31994	0,38054	0,36628	0,35915	0,34043
C2	0,35752	0,35192	0,30151	0,34165	0,38366	0,31365	0,34632	0,30805
C3	0,36837	0,38434	0,33736	0,36461	0,28755	0,32702	0,38904	0,35897
C4	0,37006	0,32022	0,33499	0,33776	0,34329	0,33222	0,41527	0,36544
C5	0,36838	0,35097	0,33264	0,37113	0,32806	0,35739	0,40320	0,30790
D1	0,35637	0,36083	0,31450	0,37508	0,33588	0,35103	0,37775	0,35281
D2	0,35796	0,34562	0,33042	0,37410	0,34182	0,35891	0,35891	0,35891
D3	0,34240	0,35495	0,34419	0,37735	0,35315	0,32268	0,37646	0,35405
D4	0,37904	0,36202	0,32797	0,33603	0,35754	0,34410	0,37188	0,34679
D5	0,34527	0,35016	0,34038	0,33354	0,38538	0,35212	0,36777	0,35114
D6	0,36590	0,37310	0,33264	0,34343	0,35512	0,32904	0,37040	0,35602
D7	0,37971	0,36117	0,31878	0,34616	0,36294	0,33821	0,35146	0,36647
E1	0,35744	0,37166	0,34037	0,35175	0,33563	0,34132	0,31856	0,40484
E2	0,36954	0,35815	0,34940	0,37479	0,34677	0,33626	0,34852	0,34327
E3	0,36918	0,32063	0,36311	0,33378	0,34592	0,37019	0,35199	0,37019
E4	0,38407	0,37080	0,32338	0,35183	0,35278	0,35847	0,32433	0,35847
E5	0,38661	0,37936	0,33228	0,35130	0,37303	0,35311	0,32051	0,32594

- d. Peringkat 4 : Alternatif K4 (Kecamatan Wiyung)
- e. Peringkat 5 : Alternatif K5 (Kecamatan Gayungan)
- f. Peringkat 6 : Alternatif K8 (Kecamatan Jambangan)
- g. Peringkat 7 : Alternatif K6 (Kecamatan Dukuh Pakis)
- h. Peringkat 8 : Alternatif K3 (Kecamatan Sawahan)

4.4.6. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil yang telah dibahas pada penelitian ini, didapatkan beberapa hal yang dapat diterapkan pada proses evaluasi kualitas pelayanan kecamatan. Hal-hal tersebut adalah pembobotan setiap sub-kriteria dalam penilaian yang dihitung dengan metode AHP, aspek-aspek yang harus lebih diperhatikan dari setiap kecamatan yang didapatkan dari proses operasi fuzzy, serta hasil perankingan kecamatan di Surabaya Selatan yang dilakukan dengan menggunakan metode TOPSIS, dimana matriks keputusan dan bobot sub-kriteria didapatkan dari dua proses sebelumnya yaitu AHP dan operasi bilangan fuzzy.

Evaluasi pada kualitas pelayanan kecamatan di Surabaya Selatan juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Pemerintah menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan meninjau langsung dan melakukan wawancara. Jika dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) selama dua tahun terakhir, kecamatan Karang Pilang menempati posisi pertama dengan nilai rata-rata IKM 82,845 dan pada indeks mutu pelayanan terakreditasi B. Ranking selanjutnya adalah kecamatan Wiyung dengan nilai rata-rata IKM sebesar 82,803

dan terakreditasi B. Ranking ketiga ditempati oleh kecamatan Wonokromo dengan nilai rata-rata IKM sebesar 80,48205. Ranking keempat yaitu kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rata-rata IKM sebesar 80,456. Ranking kelima sampai ketujuh berturut-turut ditempati oleh kecamatan Jambangan(79,4313), Wonocolo(78,794), dan Gayungan(76,853). Kecamatan yang menempati posisi terakhir dalam penilaian oleh pemerintah Kota Surabaya adalah Kecamatan Sawahan dengan nilai rata-rata IKM sebesar 75,7597 dan indeks mutu pelayanan C.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditinjau bahwa terdapat kesamaan antara penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dengan perhitungan dalam penelitian ini. Perhitungan dalam penelitian ini dengan penilaian pemerintah menghasilkan kecamatan terbaik dan terburuk yang sama, yaitu kecamatan Karang Pilang sebagai kecamatan terbaik dan Kecamatan Sawahan sebagai kecamatan terburuk di Surabaya Selatan. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan seperti kecamatan Wiyung menempati posisi kedua pada penilaian pemerintah, sedangkan pada penelitian ini kecamatan Wiyung menempati posisi keempat. Akan tetapi perbedaan tipis terjadi pada kecamatan Wonokromo, dimana pada penelitian ini Wonokromo menempati posisi kedua sedangkan pada penilaian pemerintah Wonokromo menempati posisi kedua. Perbedaan-perbedaan ini wajar terjadi dikarenakan oleh faktor pendekatan yang sedikit berbeda, dan jumlah sampel yang berbeda. Jika pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, pada penilaian pemerintah juga dilakukan pendekatan kualitatif dengan meninjau secara langsung ke kantor kecamatan dan melakukan wawancara terkait keluhan masyarakat. Berdasarkan kedekatan hasil penelitian ini dengan hasil penilaian pemerintah, maka penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi kualitas pelayanan pada kecamatan di

- a. Kecamatan Wonokromo : Kesesuaian waktu dalam menyelesaikan pelayanan
 - b. Kecamatan Wonocolo : Kesesuaian waktu dalam menyelesaikan pelayanan
 - c. Kecamatan Sawahan : Tersedianya media hiburan seperti televisi dan majalah
 - d. Kecamatan Wiyung : Kesesuaian waktu dalam menyelesaikan pelayanan
 - e. Kecamatan Gayungan : Ketersediaan pegawai atau staff di meja pelayanan selama jam kerja
 - f. Kecamatan Dukuh Pakis : Mesin antrian dan sistem antrian yang teratur, kecepatan dalam menanggapi complain atau pengaduan
 - g. Kecamatan Karang Pilang : Kesesuaian output yang dihasilkan
 - h. Kecamatan Jambangan : Kecepatan dalam menanggapi complain atau pengaduan
3. Hasil dari perankingan kecamatan di Surabaya Selatan berdasarkan survey kepuasan masyarakat dengan menggunakan metode fuzzy MCDM adalah Karang Pilang sebagai peringkat pertama, Wonokromo sebagai peringkat kedua, Wonocolo sebagai peringkat ketiga, Wiyung sebagai peringkat keempat, Gayungan sebagai peringkat kelima, Jambangan sebagai peringkat keenam, Dukuh Pakis sebagai peringkat ketujuh, dan Sawahan sebagai peringkat kedelapan atau peringkat terakhir.

- Mardiasmo. (2002). *Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Munir, R. (2018). *Logika Fuzzy*. Bandung.
- Ningrum, M., Sutarman, Sitepu, R. (2012). Aplikasi Metode TOPSIS Fuzzy dalam Menentukan Prioritas Kawasan Perumahan di Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Sainia Matematika*. Vol. 1, pp. 101-115.
- Nurdiyanto, H. (2018). Pengertian Layanan Publik, Prinsip, Jenis, dan Contohnya. <https://dosenppkn.com/pengertian-layanan-publik/>. Diakses pada 27 September 2019.
- OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. (2020). "2019, Pengaduan Pelayanan Publik Masih Tinggi". <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-2019-pengaduan-pelayanan-publik-masih-tinggi>. Diakses pada 14 Juni 2020.
- Pemkot Surabaya, J. T. (2018). Pembagian Kecamatan Per Wilayah. <https://surabaya.go.id/id/page/0/8166/kecamatan>. Diakses pada 27 September 2019.
- Peraturan Walikota, S. (2016). *Peraturan Walikota Surabaya No. 73 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerj Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya*. Surabaya.
- Pratama, M. H. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor), *Vol. 3*, 90-98.

- Prayoga, N. D. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah Sakit Trtbaik di Asahan Menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). *Jurnal Sistem Informasi*.
- Purwanto, E. A., & Dkk. (2016). *Modul Pelatihan Dasar Kader PNS (Pelayanan Publik)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Riadi, M. (2013). Sistem Pendukung Keputusan (SPK). <https://www.kajianpustaka.com/2013/09/sistem-pendukung-keputusan-spk.html>. Diakses pada 17 Oktober 2019.
- Risna. (2018). Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Administratif di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir). *JOM FISIP*, 5(1), 1-10.
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu. *Vol. (2)*, 56-65.
- Santiary, P.A., & Dkk. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Wisata dengan Metode TOPSIS. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 5(5), 621-628.
- Shaverdi, M., Akbari, M., & Tafti, S. F. (2011). Combining Fuzzy MCDM with BSC Approach in Performance Evaluation of Iranian Private Banking Sector. *Advances in Fuzzy Systems Journal*.
- Siagian, D, & Sugiarto. (2006). *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjamsulhadi. (2011). *Analisis Modal Intelektual pada Perusahaan Jasa Kontraktor dengan Menggunakan Metode AHP*. Universitas Terbuka.

- Sosiologis.com. (2018). Data Primer dan Data Sekunder. <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses pada 26 Oktober 2019
- Surabaya.go.id. (2018). Kecamatan di Surabaya. <https://surabaya.go.id/id/page/0/8166/kecamatan>. Diakses pada 20 Oktober 2019.
- Suryani, I., Jamaluddin. (2016). Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*. (2). 133-142.
- Susanti, S. (2014). *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Gamping*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sutikno. (2016). Perbandingan Metode Defuzzifikasi Aturan Mamdani Pada Sistem Kendali Logika Fuzzy. *Seminar Tugas Akhir UNDIP*, 1-10.
- Syaifullah. (2010). Pengenalan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), 1-11.
- Teriyasmur, R. I. (2014). *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas untuk Pemberian Tunas Usaha Syariah pada BNI Syariah Cabang Palembang dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) Berbasis Web*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Tsaur, S., Chang, T., & Yen, C. (2002). The evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM, 23, 107-115.
- UNM, L. P. (2018). Penelitian Dasar dan Terapan. <https://penalaran-unm.org>. Diakses pada 13 Oktober 2019.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009*. Jakarta.

Wahyuningsih, S. (2014). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penilaian Kinerja Pegawai Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada RSUD Serang, (1), 33-37.

Yadi, R., Sobri, M., Kunang, S.O. (2015). Implementasi Metode TOPSIS untuk Menentukan Karyawan Terbaik di PT.KFC Cabang Demang.

Yavuz, M., Kumar, K. K., & Nagaraju, D. (2018). TOPSIS Method Application for Decision Support System in Internal Control for Selecting Best Employees TOPSIS Method Application for Decision Support System in Internal Control for Selecting Best Employees. *Journal of Physics: Conference Series*, 1028.

Zadeh, L. A. (1975). The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning-I. *Information Sciences* 8, 199-249.